

EVALUASI PROGRAM SISTEM PENDIDIKAN TERPADU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR (Evaluating the Program of Integrated Education System of the Department of Education and Culture, Aceh Besar District)

Silahuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sila_huddin@yahoo.com

Ana Sofia

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tgk. Chik Pantekulu Banda Aceh
anasofia.pantekulu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian dari Program Pendidikan Terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh Besar. Pelaksanaan program ini dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi yang terjadi di Aceh Besar, diantaranya masih banyak ditemukan adanya kasus-kasus terkait dengan moral masyarakat, baik di tingkat anak-anak maupun dewasa, sehingga membentuk karakter dari masyarakat melalui sekolah sangat penting. Diantara usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh Besar adalah menerapkan Pendidikan Terpadu di Sekolah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Program Pendidikan Terpadu ini telah berlangsung sesuai dengan tahapan dan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya diharapkan akan terlaksana proses sistem pendidikan terpadu pada setiap sekolah sasaran dan terjadi peningkatan mutu pendidikan dan melahirkan siswa yang berkarakter islami. Program ini diharapkan menjadi model yang dapat diadopsi oleh pemerintah-pemerintah daerah lainnya, guna mencapai tujuan pendidikan nasional, baik tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci: *Evaluasi, Pendidikan Islam Terpadu, Aceh Besar*

Abstract

This study aims to determine the achievements of the Integrated Education Program implemented by the Department of Education in Aceh Besar. The implementation of this program is motivated by various conditions that occur in Aceh Besar, such as there are still many cases related to community morals, both at the level of children and adults, so that shaping the character of the community through schools is crucial. Among the efforts made by the Department of Education in Aceh Besar is to implement Integrated Education at schools. The results of the research found that the implementation of the Integrated Education Program had taken place in accordance with the stages and standards that had been set. Furthermore, it is hoped that an integrated education system process will be carried out in each target school and there will be an increase in the quality of education to create the students with Islamic characteristics. This program is expected to be a model that can be adopted by other local governments, in order to achieve national education goals, both local and national levels.

Keywords: *Evaluation, Integrated Islamic Education, Aceh Besar*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap warga negara, tanpa pendidikan tidak mungkin adanya transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” hal ini menegaskan bahwa setiap warga negara di Indonesia tanpa terkecuali

mempunyai hak yang sama dalam belajar dan pembelajaran. Dalam Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 juga disebutkan bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada ayat 2 juga lebih ditegaskan lagi bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Konsep Pembangunan Nasional bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.¹

Sejalan dengan konsep tersebut, dalam kerangka Otonomi Daerah, merupakan suatu keharusan setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan menyusun suatu perencanaan strategis sesuai dengan situasi, kondisi lingkungan dan cita-cita yang hendak dicapai. Tujuan dan cita-cita tersebut diwujudkan dalam Visi sebagai landasan pencapaian tujuan jangka menengah maupun jangka panjang.

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.² Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut: Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip

¹ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

² Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya.

Proses pendidikan harus mencakup: (1) penumbuh-kembangan keimanan, ketaqwaan; (2) pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian; (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan, penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni; serta (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.⁴

Ketiga; Adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

Keempat; Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.⁵

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan

⁴ Afif Faizin, *Integrasi Pendidikan Agama Islam dan Mata Pelajaran Umum di SMP Tara Salvia*, 2018, hal. 62

⁵ Niam Pathulhadi, *Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Kelas IX Di SMP Hasanudin 4 Semarang*, 2013, hal. 52

tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

Seiring dengan kebijakan pendidikan nasional tersebut di atas, kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pembangunan akan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia menuju masyarakat madani yang berkarakter. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah peningkatan mutu relevansi, daya saing dan tata kelola pendidikan yang islami. Diantaranya dengan peningkatan kompetensi guru, penyelenggaraan program sistem pendidikan terpadu dan pelaksanaan program pendidikan karakter bangsa serta akan dibarengi dengan peningkatan sistem tata kelola pendidikan yang bersih, berkualitas, akuntabel dan transparan, yang juga akan dibarengi dengan pemberian reward dan punishment yang tepat sasaran.

Ada beberapa isu yang berkembang antara lain (1) rendahnya nilai religius pada sekolah umum (2) rendahnya mutu lulusan yang berkarakter baik, (3) rendahnya kompetensi guru, dan (4) kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum.⁶

Oleh karena itulah sudah sangat dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat dan dukungan dari berbagai pihak untuk membangun pendidikan di Kabupaten Aceh Besar yang bermutu, berdaya saing, berkarakter, transparan dan akuntabel berdasarkan Syariat Islam.

Dari beberapa uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar dalam rangka menjalankan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, telah melaksanakan sebuah program unggulan yaitu program sistem pendidikan terpadu dari jenjang sekolah dasar dan menengah, dengan pola pendidikan sehari penuh selama enam hari dalam satu minggu.

Penerapan Konsep sistem Pendidikan terpadu merupakan sebuah solusi alternatif yang digagas oleh pemerintah kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan Aceh Besar sebagai respon dari adanya kesenjangan dalam dunia pendidikan, khususnya antara pendidikan agama dengan pendidikan pendidikan umum, perkembangan teknologi yang sangat cepat, meningkatnya angka kekerasan, perilaku menyimpang dan penyalahgunaan Narkoba. Sistem Pendidikan terpadu merupakan sistem pendidikan yang mengintegrasikan antara pendidikan agama, umum dan kearifan lokal. Sistem pendidikan terpadu mencakup tiga aspek pendidikan yaitu pendidikan keluarga, lembaga pendidikan sekolah, dan lembaga pendidikan masyarakat.⁷

Penelitian ini akan mengangkat hasil penelitian dengan melakukan evaluasi dari penerapan Sistem Pendidikan Terpadu di Kabupaten Aceh Besar. Bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan terpadu tersebut? Apa saja capaian yang sudah nampak dari penerapan sistem Sekolah Terpadu tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian evaluasi. Penelitian ini ingin mengetahui tentang efektifitas dari sebuah program, dalam hal ini adalah program Pendidikan terpadu di Sekolah. Penelitian ini dilakukan di beberapa sekolah yang sudah diterapkan Pendidikan Terpadu di Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data

⁶ Niam Pathulhadi, *Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Kelas IX Di SMP Hasanudin 4 Semarang*, 2013, hal. 72

⁷ Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 116-118.

penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur, dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi untuk validitas data.

Analisis data penelitian ini mengikuti model yang digunakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi (pemilahan) data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁸ Data yang telah didapatkan dari wawancara dipilah dengan menggunakan kategori-kategori dalam bentuk tabel. Data-data yang tidak diperlukan dipilah, kemudian data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian ditampilkan tabel, kemudian Data-data dijadikan bahan analisis.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan sistem Pendidikan terpadu di sekolah-sekolah yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Besar didasari pada aturan hukum dan perundang-undangan yang digunakan acuan pelaksanaan sistem pendidikan terpadu, adapun acuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Sekolah Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
12. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Qanun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.

Dan juga didasari pada Landasan Pemikiran pelaksanaannya, yaitu:

1. PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB XV pasal 92 ayat (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
2. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Tahun 2018-2022⁹
3. Kondisi sebagian besar persekolahan kita memang masih jauh dari yang diharapkan masyarakat.
4. Diperlukan 'benchmark' berupa 'sosok' sekolah tertentu yang dianggap baik, yang dijadikan patokan untuk 'ditiru'. Semua sekolah mengelola dan menggerakkan sekolah beserta seluruh

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 246-266.

⁹ Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Visi dan Misi, <http://acehbesarkab.go.id/index.php/page/11/visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2020;

komponennya untuk mencapai standar minimal dan pendidikan berkarakter seperti sekolah tersebut.¹⁰

Tujuan penerapan Program sistem Pendidikan terpadu adalah:

1. Membangun jiwa nasionalisme kebangsaan sejak dini
2. Melakukan pembinaan karakter kepada peserta didik di Aceh Besar
3. Pembiasaan dan Pembudayaan karakter baik di sekolah
4. Mengisi waktu dan menggiatkan peserta didik untuk senantiasa mengisi waktu dengan kegiatan mendidik
5. Pendidikan *Soft Skill* (pengembangan sikap dan kepribadian siswa, pengembangan diri, dan sikap mental)
6. Melahirkan insan Qur'ani

Adapun Prinsip pelaksanaan Program sistem Pendidikan terpadu adalah:

1. Guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional
2. Pendidikan berdasarkan potensi peserta didik
3. Metode pendidikan: qudwah (suri tauladan), mau'idzah (menasehati), muraqabah (keyakinan terhadap Allah SWT bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi setiap perbuatan hamba-Nya), dan uqubah (sanksi/hukuman sebagai upaya pencegahan)
4. Lingkungan faktor penting dalam pendidikan
5. Pendidikan sebagai suatu sistem
6. Perpaduan pendidikan dengan lembaga pendidikan lainnya

Secara garis besar program sistem Pendidikan terpadu yang di laksanakan di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Aceh Besar adalah untuk menanamkan dan membentuk karakter anak didik, sebagai berikut:

1. Membentuk sikap yang Islami, seperti: Pengetahuan dasar tentang Iman, Islam, dan Ihsan, Pengetahuan dasar tentang akhlak terpuji dan tercela, Kecintaan kepada Allah dan Rasul Nya, Kebanggaan kepada Islam dan semangat memperjuangkannya.
2. Pembiasaan berbudaya Islam, seperti: Gemar beribadah, Gemar belajar, Jujur, Disiplin, Kreatif, Mandiri, Hidup bersih dan sehat, Adab-adab Islam, Penguasaan pengetahuan dan ketrampilan.
3. Pengetahuan materi pokok fardhu 'ain dan kifayah;
4. Hafal al-Qur'an dan shalawat;
5. Mengetahui dan terampil dalam beribadah sehari-hari
6. Terampil berbahasa Asing dan Terampil dalam berbudaya lokal (bahasa dan seni lokal)
7. Terampil berolah raga, Kewirausahaan, serta Pengembangan kreatifitas¹¹

Dengan penerapan sistem Pendidikan terpadu diharapkan akan dapat mewujudkan dan meningkatkan harkat dan martabat Pendidikan Aceh besar dalam bingkai syariat islam. Ada beberapa pengarus yang di harapkan dengan pelaksanaan system Pendidikan terpadu di dinas Pendidikan dan kebudayaan aceh besar, antara lain yaitu:

1. Terselenggaranya pendidikan yang berkarakter islami dan berbasis pada keunggulan local;
2. Meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada sekolah di Kabupaten Aceh Besar;
3. Meningkatnya mutu kompetensi guru di Kabupaten Aceh Besar;

¹⁰Arfah Ibrahim, *Pembentukan Karakter Mahasiswa Perguruan Tinggi Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terintegrasi* (Study Kasus Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2019, hal. 77.

¹¹ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Visi dan Misi, <https://disdikbudacehbesar.org/pages/visi-misi>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

4. Keselarasan pendidikan formal dengan pendidikan agama.¹²

Implementasi program sisem Pendidikan terpadu tidak dilakukan di seluruh sekolah SD/SMP di Aceh Besar, namun dilakukan secara bertahap, jumlah sekolah SD di aceh besar 230 dan SMP 73, namun tahap pertama mengambil beberapa sekolah unggul sebagai percontohan dan sampel, yang nantinya akan di imbaskan ke seluruh sekolah SD/SMP yang ada di wilayah Aceh Besar.

Adapun Sekolah yang di ambil sebagai pilot projeknya adalah pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Pada jenjang sekolah Dasar ada 23 sekolah pilot projek, yaitu:

Tabel 1. Jenjang Sekolah Dasar

No	Nama Sekolah	NPSN	Jenjang	Kecamatan
1	SD Negeri 1 Saree	10107325	SD	Kec. Leumbah Seulewah
2	SD Negeri Seulimeum	10107452	SD	Kec. Seulimeum
3	SD Negeri 2 Kota Jantho	10107331	SD	Kec. Kota Jantho
4	SD Negeri Banda Safa	10100313	SD	Kec. Kuta Cot Glie
5	SD Negeri 1 Indrapuri	10107313	SD	Kec. Indrapuri
6	SD Negeri Samahani	10107449	SD	Kec. Kuta Malaka
7	SD Negeri Sibreh	10107457	SD	Kec. Suka Makmur
8	SD Negeri Montasik	10107437	SD	Kec. Montasik
9	SD Negeri Simpang Tiga	10107460	SD	Kec. Simpang Tiga
10	SD Negeri Cot Meuraja	10107363	SD	Kec. Blang Bintang
11	SD Negeri Lampeuneurut	10107409	SD	Kec. Darul Imarah
12	SD Negeri Neusok Teubalui	10107439	SD	Kec. Darul Kamal
13	SD Negeri Bueng Cala	10100302	SD	Kec. Kuta Baro
14	SD Negeri Lambaro Angan	10107389	SD	Kec. Darussalam
15	SD Negeri Lamreung	10107414	SD	Kec. Krung Barona Jaya
16	SD Negeri Lambada Klieng	10107388	SD	Kec. Baitussalam
17	SD Negeri Krueng Raya	10100147	SD	Kec. Mesjid Raya
18	SD Negeri Keude Bieng	10107379	SD	Kec. Lhoknga
19	SD Negeri 1 Peukan Bada	10107324	SD	Kec. Peukan Bada
20	SD Negeri Layeun	10107423	SD	Kec. Leupung
21	SD Negeri Mon Mata	10107435	SD	Kec. Lhoong
22	SD Negeri Kandang	10107376	SD	Kec. Pulo Aceh
23	SD Negeri 1 Pagar Air	10100295	SD	Kec. Ingin Jaya

Sedangkan pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama adal 10 sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama

No	Nama Sekolah	NPSN	Jenjang	Kecamatan
1	SMP Negeri 1 Seulimeum	10100202	SMP	Kec. Seulimeum
2	SMP Negeri 1 Sukamakmur	10100201	SMP	Kec. Suka Makmur
3	SMP Negeri 3 Ingin Jaya	10100221	SMP	Kec. Ingin Jaya
4	SMP Negeri 1 Peukan Bada	10100204	SMP	Kec. Peukan Bada
5	SMP Negeri 2 Mesjid Raya	10100226	SMP	Kec. Mesjid Raya

¹² <https://disdikbudacehbesar.org/pages/visi-misi>

6	SMP Negeri 1 Lhoong	10100206	SMP	Kec. Lhoong
7	SMP Negeri 1 Kota Jantho	10100207	SMP	Kec. Kota Jantho
8	SMP Negeri 1 Darussalam	10100209	SMP	Kec. Darussalam
9	SMP Negeri 1 Darul Imarah	10100210	SMP	Kec. Darul Imarah
10	SMP Negeri Ali Hasjmy	10100xxx	SMP	Kec. Indrapuri

Pelaksanaan sistem Pendidikan Terpadu dilakukan dengan beberapa tahapan Pelaksanaan, yaitu:

1. FGD dan ToT untuk para kepala sekolah dan pengawas sekolah;
2. Sosialisasi oleh Kepala Sekolah kepada seluruh guru dan Komite sekolah pada masing-masing sekolah
3. Sekolah melakukan persiapan dan evaluasi rencana pelaksanaan:
 - a. Memutuskan kegiatan yang akan dilaksanakan
 - b. Merumuskan capaian masing-masing kegiatan
 - c. Menyusun Prosedur Operasi Baku masing-masing kegiatan
 - d. Menyusun kebutuhan dana dan sumber daya lainnya perkegiatan
4. Rapat sekolah, komite sekolah dengan orang tua murid
5. Pelatihan, pemenuhan pendukung, dan rapat-rapat di masing-masing sekolah
6. Evaluasi akhir rencana pelaksanaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar
7. Sosialisasi program kepada pihak terkait oleh sekolah dan komite sekolah
8. Pemberlakuan kegiatan mulai semester ganjil tahun pelajaran 2018/2019, 9 Juli 2018.

Berikut Program dan Kegiatan yang diterapkan pada Sekolah Sistem Pendidikan Terpadu di kabupaten Aceh Besar:

1. Kegiatan Pagi Hari
 - a. Budaya disiplin mulai dari awal masuk sekolah dengan menyambut siswa oleh guru di pintu/gerbang sekolah pada pagi hari dengan salam sapa dan senyum
 - b. Melaksanakan rutinitas pada pagi hari (Upacara bendera setiap hari senin, dan senam kesegaran jasmani setiap hari sabtu)
 - c. Budaya literasi sebelum memasuki ruang belajar dilanjutkan dengan tahsin Al Qur'an, dan wirid (surat Yasin, Al Wakhiah, Al Muluk) khusus hari Jum'at
 - d. Shalat Dzuhur di sela-sela istirahat pertama
 - e. Proseses pembelajaran mata pelajaran umum sesuai kurikulum nasional
 - f. Shalat dzuhur berjama'ah
2. Sore Hari (Kls. 4-6 SD dan 7-9 SMP)
 - a. Kegiatan Diniyah (Fiqih, Al-Qur'an/Hadist, Akidah Akhlak, SKI, Praktek Ibadah)
 - b. Tahfidz Al Qur'an (Min. 1 Juz SD, 2 Juz SMP)
 - c. Minat Bakat (Seni dan Olahraga)
 - d. Remedial
 - e. Bahasa Asing/Daerah
 - f. Pengembangan Kreatifitas (Kewirausahaan, Kepramukaan, dll)

Implementasi sistem Pendidikan terpadu juga dilaksanakan dengan Manajemen Berbasis Sekolah.¹³ Sekolah dengan program sistem pendidikan terpadu akan menggunakan sistem manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu pengelolaan sekolah secara mandiri dengan

¹³ Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta, Grasindo, 2003), hal. 1.

melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberdayaan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang besar untuk mengelola sumber daya sekolah,¹⁴ dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.¹⁵

Warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Sekolah harus mampu menyusun Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan, dan;
3. Sekolah menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) bersama-sama dewan guru dan komite sekolah.

Begitu juga Dalam penyelenggaraannya yang menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten adalah:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sekolah
2. Rekrutmen calon dan penempatan guru/tenaga pendidik
3. Pemberian tambahan penghasilan bagi guru/tenaga pengajar/pengampu
4. Tambahan biaya operasional bagi sekolah

A. Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:

1. Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang jajan, makan siang, buku tulis dan alat-alat tulis dan lain sebagainya;
2. Pendanaan sebagian biaya investasi (seperti fasilitas IT bagi siswa) dan sebagian biaya pendidikan tambahan yang diperlukan bagi pengembangan sekolah.

B. Standar Pelayanan Minimal

1. Standar Kurikulum/Isi
 - a. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Standar Isi/Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016)
 - b. Memuat kearifan lokal
 - 1) Kemampuan baca/hafal Al Qur'an
 - 2) Kemampuan Bahasa Asing
 - 3) Kemampuan Bahasa dan Budaya Aceh
 - 4) Fiqih, Al Qur'an/Hadist, Akidah Akhlak, SKI, dan Praktek ibadah
2. Standar Proses
 - a. Belajar menggunakan Media Pembelajaran/IT;
 - b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;¹⁶
 - c. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih pesertadidik, dan melaksanakan tugas tambahan;
 - d. Sekolah menyelenggarakan proses pembelajaran/kegiatan tatap muka selama 6 hari

¹⁴ Afif Achadah, "Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): konsep dasar dan implementasinya dalam satuan pendidikan", *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4 (2) 2019.

¹⁵ Delismar Delismar, *Penerapan Model Problem-Based Learning dengan Media Mofil untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik*.

<https://ojsdikdas.kemdikbud.go.id/index.php/didaktika/article/view/78>.

¹⁶ Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 22 tahun 2016, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/prosespembelajaran/file/Permendikbud_Tahun2016_Nomor022_Lampiran.pdf.

sekolah, khusus sore hari menggunakan guru yang memiliki kompetensi sesuai standar yang dibutuhkan yang ada di sekolah dan/atau guru dari luar jika di sekolah tidak tersedia.

Untuk program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh lembaga independen.¹⁷

Komunikasi merupakan hal yang wajib dikuasai dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Menurut Marfuah (2017) proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik karena adanya komunikasi yang bersifat intrapersonal maupun yang bersifat interpersonal. Kemampuan untuk berfikir, mengingat sesuatu serta melakukan persepsi merupakan kemampuan komunikasi yang bersifat intrapersonal. Sedangkan proses menyalurkan ide, gagasan tentang suatu informasi, menyimak argumentasi serta menghargai pendapat dari orang lain merupakan kemampuan komunikasi yang bersifat interpersonal.¹⁸

Kemampuan berkomunikasi juga menjadi jembatan antara guru dan siswa dalam menemukan konsep yang tepat dalam suatu pembelajaran. Hal ini dikarenakan komunikasi bisa membantu dan memfasilitasi siswa dalam mengutarakan pendapat, gagasan serta informasi yang diharapkan. Keterampilan mengomunikasikan perlu diasah dan diterapkan dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik maka siswa akan memiliki rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat serta argumentasinya sehingga menjadi sarana dalam pengembangan diri untuk menghargai pendapat orang lain yang berbeda-beda di sekitarnya.

Keterampilan berkomunikasi menjadi hal yang sangat penting dikuasai oleh siswa dalam menyambut era pendidikan di abad 21. Kompetensi belajar yang harus dikuasai yaitu kemampuan pemahaman yang tinggi, berpikir kritis, kemampuan dalam berkolaborasi dan berpikir tingkat tinggi.

C. Monitoring dan Supervisi

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program.¹⁹ Komponen utama yang dimonitor antara lain:

- Pelaksanaan Program
- Kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dilakukan oleh Tim Kabupaten dan Tim Manajemen Sekolah Program Sistem Pendidikan Terpadu Kabupaten.

¹⁷ Nana, Syaodih Sukmadinata. 2004. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya

¹⁸ Marfuah. (2017). *Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Peserta Didik*. Volume 26, 148-160

¹⁹ Laili Komariyah, Iya' Setyasih, Wahyudi, "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran di SMA Negeri Kota Samarinda", Prosiding Seminar Nasional Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Hotel Ramcy, Makassar, 21 April 2018.

D. Pelaporan

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Sistem Pendidikan Terpadu, masing-masing pengelola program (Tim Manajemen Kabupaten, dan Tim Manajemen Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada pihak terkait.

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerimaan bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, pelaksanaan program, hasil monitoring, evaluasi dan pengaduan masalah.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan dengan cara wawancara koresponden. Ada delapan pertanyaan yang di ajukan, yakni :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana anda melihat perkembangan dunia pendidikan di Aceh Besar?	Dengan hadir program Sistem Pendidikan Terpadu Memberikan dampak kepada perkembangan dunia pendidikan Aceh Besar. Parameter perubahan pada pola belajar yang dulunya monoton pada kurikulum nasional namun sekarang lebih di dorong terhadap perpaduan kurikulum nasional dengan konsep pembelajaran yang dimulai sejak pagi dengan penanaman karakter siswa contohnya di pagi hari diawali dengan literasi kemudian jam sepuluh adanya shalat dhuha dan perpaduan pembelajaran lain secara terpadu
2	Bagaimana konsep sistem pendidikan terpadu?	Pendidikan Pagi dan Sore Hari
3	Sejauh mana perkembangan Sistem Pendidikan Terpadu?	SPT terus berjalan tentunya dengan terus dilakukan pembenahan, dan tentunya perlu waktu untuk bisa mengukur tingkat keberhasilan
4	Apa strateginya?	Ada berbagai macam strategi yang dilaksanakan untuk mencapai Sistem Pendidikan Terpadu.
5	Kendala yang di hadapi?	Kendala yang di hadapi dari sisi SDM lebih tepatnya guru dan kepala sekolah, kita terus mendorong guru untuk peningkatan kompetensi kemudian melakukan pemerataan guru pada sekolah-sekolah sasaran SPT, kualitas guru pada sekolah Spt harus berbeda dengan sekolah imbas yang di lakukan pendidikan dan kebudayaan adalah merekrut guru tahfid dan penempatan guru terbaik pada sekolah spt strategi ini di lakukan untuk mempercepat capaian spt seperti misi pendidikan yang di gagaskan pemerintah kabupaten Aceh besar, peningkatan kompetensi kepala sekolah dengan kerja sama dengan lembaga terkait adalah bahagian dari tujuan agar spt berjalan maksimal
6	Apa tolok ukur keberhasilannya?	Terlaksananya pembiasaan budaya islami di sekolah seperti adab adab terhadap guru dan yg lebih tua,c Tilawatil Qur'an, shalat dhuha, shalat fardhu berjamaah. Tolok ukur hasil Diniyah materi capaian meliputi Thaharah, shalat, puasa, zakat, tauhid, akhlak, SKI, hadist arbain, muamalah dan fadhilaj amal. Tolok ukur hasil tahfidh: SD Lulus min. Hafal 1juz, SMP Lulus min. Hafal 2 juz
7	Secara umum bagaimana dengan hasil UNBK Aceh Besar?	a. Hasil UNBK belum ada pak, karena belum pengumuman, tapi upaya kita untuk peningkatan nilainya dengan mengadakan pemantapan ujian di mulai dari bulan Januari dengan membahas kisi-kisi ujian UNBK 2019. Anak mulai bulan Januari atau mulai semester 2 sudah mulai membahas soal2 yg

	berhubungan dengan kisi2 UNBK di pagi hari terutama pelajaran yang di UNBK kan bahasa Indonesia, matematika, IPA dan bahasa inggris
	b. Sebelum UNBK kita juga mewajibkan sekolah untuk melakukan simulasi, UNBK supaya siswa tidak asing lagi saat menggunakan komputer saat ujian UNBK karena untuk tahun 2019 semua ujian nasional berbasis komputer
8	Apa target pendidikan ke depan? Capaian SPM Pendidikan bisa mencapai 85%, karena saat ini Aceh Besar masih tertinggal jauh dari daerah lain terutama Banda Aceh dalam capaian SPM, ini terjadi karena salah satu indikator ketersediaan guru PNS yang masih belum sesuai standar yang ditetapkan, dan sebagian sekolah belum terpenuhinya sarana dan prasarana.

Dari jawaban yang didapatkan, maka dapat dianalisis bahwa dengan adanya Program Sistem Pendidikan Terpadu, pendidikan di Aceh Besar mengalami perubahan yang sangat penting. Tentu saja ini menjadi suatu prestasi yang sangat menggemberikan. Walaupun Sekolah yang dijadikan pilot project masih sedikit, tentu saja ini bisa menjadi batu loncatan untuk kemajuan pendidikan Aceh Besar kedepannya.

Bila dilihat dari hasil jawaban, yang dijadikan tolak ukur adalah Pendidikan Kota Banda Aceh, yang notabene adalah tetangganya kabupaten Aceh Besar dan merupakan Ibukota Provinsi Aceh. Jadi bila pendidikan Aceh Besar masih tertinggal jauh dari Kota Banda Aceh, maka tentu saja menjadi isu krusial dan perlu pembenahan yang sangat signifikan dalam pendidikan Aceh Besar.

Satu sisi, masih ada kendala yang perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah Aceh Besar adalah pembenahan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini adalah guru. Dan dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir, Pemerintah Aceh Besar terus melakukan pembenahan dengan memberikan kouta beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemuadian juga pembenahan dalam bidang inprastruktur dan media pembelajaran, sehingga anak didik semakin semangat dalam belajar. Pemerataan Pendidik juga menjadi satu hal yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar, sehingga tidak ada kesenjangan yang terjadi antara satu wilayah dengan wiayah lainnya.

Acuan tolak ukur keberhasilan disini adaah terlaksananya pembiasaan budaya islami di sekolah seperti adab adab terhadap guru dan yg lebih tua,c Tilawatil Qur'an, shalat dhuha, shalat fardhu berjamaah. Tolok ukur hasil Diniyah materi capaian meliputi Thaharah, shalat, puasa, zakat, tauhid, akhlak, SKI, hadist arbain, muamalah dan fadhilaj amal. Tolok ukur hasil tahfidh: SD Lulus min. Hafal 1juz, SMP Lulus min. Hafal 2 juz.

SIMPULAN

Pelaksanaan program sistem pendidikan terpadu ini telah berlangsung sesuai dengan tahapan dan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya diharapkan akan terlaksana proses sistem pendidikan terpadu pada setiap sekolah sasaran dan terjadi peningkatan mutu pendidikan dan melahirkan siswa yang berkarakter islami. Program ini diharapkan menjadi model yang dapat diadopsi oleh pemerintah-pemerintah daerah lainnya, guna mencapai tujuan pendidikan nasional, baik tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Faizin, *Integrasi Pendidikan Agama Islam dan Mata Pelajaran Umum di SMP Tara Salvia*, 2018.
- Abd. Rachman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ariyana, Y., Bestary, R., Zamroni, Z., & Pudjiastuti, A. 2018. *Buku Pegangan Pembelajaran Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi*. Jakarta: Dirjen GTK Kemendikbud.
- Arfah Ibrahim, M. Ag, *Pembentukan Karakter Mahasiswa Perguruan Tinggi Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terintegrasi (Study Kasus Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, 2019.
- Afif Achadah, "Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): konsep dasar dan implementasinya dalam satuan pendidikan", *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4 (2) 2019.
- Delismar Delismar, *Penerapan Model Problem-Based Learning dengan Media Mofil untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik*.
<https://ojsdikdas.kemdikbud.go.id/index.php/didaktika/article/view/78>
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, *Visi dan Misi*,
<https://disdikbudacehbesar.org/pages/visi-misi>, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.
- Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 22 tahun 2016, tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/prosespembelajaran/file/Permendikbud_Tahun2016_Nomor022_Lampiran.pdf.
- Laili Komariyah, Iya' Setyasih, Wahyudi, "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran di SMA Negeri Kota Samarinda", *Prosiding Seminar Nasional Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Hotel Ramcy, Makassar, 21 April 2018.
- Marfuah. *Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Peserta Didik*. Volume 26, (2017).
- Niam Pathulhadi, *Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Kelas IX Di SMP Hasanudin 4 Semarang*, 2013.
- Nurhayati, A. S. 2018. *Penerapan Pembelajaran Abad 21 Memanfaatkan Rumah Belajar*. Jakarta : PusTekom Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta, Grasindo, 2003.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, *Visi dan Misi*,
<http://acehbesarkab.go.id/index.php/page/11/visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2020;
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2007.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional